

**RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS**

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

RENSTRA Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2021-2026 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**. Dengan demikian Renstraini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Kecamatan Bathin Solapan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstraini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga RENSTRA Tahun 2018–2023 ini menjadikan arah proses pembangunan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Sebangar, Maret 2021
CAMAT BATHIN SOLAPAN

WAHYUDDIN, S.Sos, MM
NIP. 19710303 199201 1001

DAFTAR ISI		Halaman
HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL.....		v
DAFTAR GAMBAR.....		vii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....		1
1.2. Landasan Hukum		3
1.3. Maksud dan Tujuan		6
1.4. Sistematika Penulisan		6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi		1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....		36
2.2.1. Sumber Daya Manusia		36
2.2.2. Sarana dan Prasarana		41
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		47
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan		47
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan		61
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....		70
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....		2
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....		6
3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2016-2021		10
3.5. Penentuan Isi-isu Strategis		11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah		

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel 2.2	Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan.....	38
Tabel 2.3	Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon	39
Tabel 2.4	Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan	40
Tabel 2.5	Daftar aset yang dimiliki oleh Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	41
Tabel 2.6	Capaian dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020	52
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020.....	55
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	57
Tabel 2.9	Analisis Lingkungan Eksternal.....	58
Tabel 2.10	Analisis Lingkungan Internal	59
Tabel 2.11	Analisa SWOT	68
Tabel 3.1.	Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bathin solapan.....	5
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021-2026	3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bathin Solapan Tahun 2021-2026	11
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2021-2026	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna

mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Renstra Kecamatan Bathin Solapan harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bathin Solapan karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Kecamatan Bathin Solapan dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Renstra Kecamatan Bathin Solapan juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bathin Solapan karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-

- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Bathin Solapan dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Bathin Solapan;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Bathin Solapan di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perubahan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bathin Solapan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BABIV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BABVII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

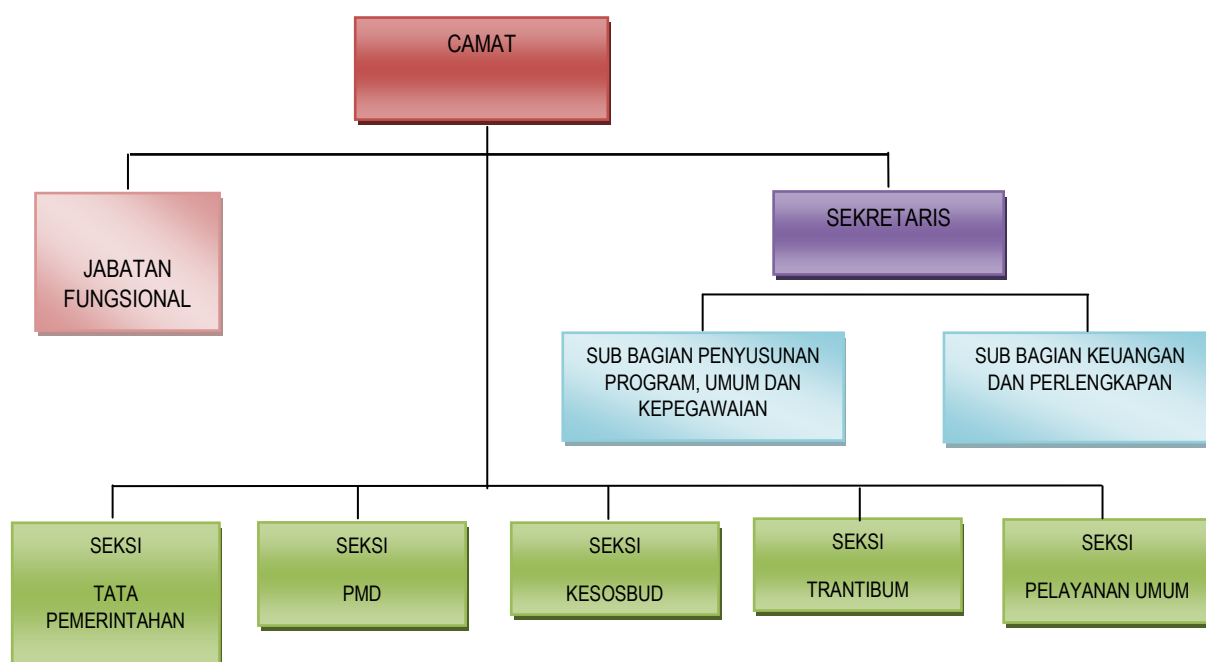
BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan di kecamatan. Adapun fungsi Camat adalah :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Penggordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
3. Penggordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah 18 orang PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 34 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	CAMAT	1	-	1
2	SEKRETARIAT	4	2	6
3	SEKSI TAPEM	3	-	3
4	SEKSI KESOSBUD	1	-	1
5	SEKSI PMD	1	-	1
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	1	-	1
7	SEKSI TRANTIBUM	5	-	5
TOTAL		16	2	18

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 18 orang PNS dilingkungan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, 16 orang (88,88%) adalah laki-laki dan 2 orang (11,11%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 17 orang PNS (94,44%) Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bekerja pada Kantor Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan sisanya sejumlah 1 orang (5,55%) merupakan pegawai yang bertugas di Pemerintah Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	CAMAT				1
2	SEKRETARIAT		1	5	
2	SEKSI TAPEM		1	2	
3	SEKSI KESOSBUD			1	
4	SEKSI PMD			1	
5	SEKSI PELAYANAN UMUM			1	
6	SEKSI TRANTIBUM		3	2	
TOTAL			5	12	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 17 orang atau 94,44%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 1 orang atau 5,55%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1	CAMAT		1	
2	SEKRETARIAT		1	2
2	SEKSI TAPEM			1
3	SEKSI KESOSBUD			-
4	SEKSI PMD			1
5	SEKSI PELAYANAN UMUM			1
6	SEKSI TRANTIBUM			1
TOTAL			2	6

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan dilingkungan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	CAMAT	1				
2	SEKRETARIAT		5		1	
3	SEKSI TAPEM				3	
4	SEKSI KESOSBUD		1			
5	SEKSI PMD				1	
6	SEKSI PELAYANAN UMUM		1			
7	SEKSI TRANTIBUM		2		3	
TOTAL		1	9		8	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 10 orang atau sebesar 55,55%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Camat Bathin Solapan.

Tabel 2.5
Daftar asset yang dimiliki oleh
Kecamatan Bathin Solapan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah	1	1			
2	Station Wagon	1	1			
3	Pick Up	1	1			
4	Sepeda Motor	1	1			
5	Laptop	7	7			
6	Printer	14	14			
7	Mesin Ketik Manual Portable	2	2			
8	AC	7	7			
9	Komputer	12	12			
10	Alat Penghancur Kertas	2	2			

11	UPS	8	8			
12	Televisi	5	5			
13	Lemari ES	1	1			
14	Kipas Angin	4	4			
15	Layar Proyektor	1	1			
16	Loudspeaker	4	4			
17	Sound system	3	3			
18	Vacuum clener	2	2			
19	Kamera	1	1			
20	Cctv	1	1			
21	Overhead projector	1	1			
22	Stabilisator	5	5			
23	Jam mekanis	3	3			
24	Antena SHF portable	2	2			
25	Dispenser	2	2			
26	Selang pemadam kebakaran	11	11			
27	Filling kabinet besi	15	15			
28	Meja kerja	10	10			
29	Meja 1/2 biro	14	14			
30	Meja rapat	1	1			
31	Kursi rapat	1	1			
32	Meja kerja pejabat lain-lain	1	1			
33	Kursi kerja pejabat eselon III	4	4			
34	Kursi kerja pejabat lain-lain	9	9			
35	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	4			
36	Kursi tamu	5	5			
37	Kursi putar	7	7			
38	Sofa	2	2			
39	Karpet	3	3			
40	Megaphone	3	3			
41	Lemari arsip dinamis	2	2			
42	Lemari kayu	7	7			
43	Tempat tidur kayu	2	2			
44	Rak sepatu (alumunium)	2	2			
45	Meja rias	2	2			
46	Rak piring (alumunium)	2	2			
47	Alat rumah tangga lain-lain (gorden)	1	1			
48	Papan pengumuman (billboard)	1	1			
49	Meja makan kayu	1	1			
50	Lukisan	6	6			
51	Ilmu pengetahuan umum	15	15			
52	Agama islam	9	9			
TOTAL		231	231	-	-	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 231 aset di lingkungan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 9231 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 100%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan

umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkulu dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2020 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.6
Capaian dan Realisasi
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	83%	87%	90%	82%	85%	84%	88%	92%
2	Persentase Kelurahan/Desa dengan Kinerja Baik	75%	80%	85%	90%	95%	75%	82%	86%	90%	95%
3	Persentase Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	80%	82%	83%	87%	90%	82%	86%	100%	89%	91%

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 6.660.317.867,00 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Tujuh Rupiah) atau sebesar 71% dari dana yang tersedia dalam DPPA yaitu sejumlah Rp. 9.362.978.669,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	-	-	-
2	2017	-	-	-
3	2018	4.233.748.199,00	1.927.302.496,00	46%
4	2019	2.641.305.480,00	2.418.746.144,00	92%
5	2020	2.487.924.990,00	2.314.260.227,00	93%
Jumlah		9.362.978.669,00	6.660.317.867,00	71%

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp2.702.660.801,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Satu Rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 26.013.084.164,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Belas Juta Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 15.699.560.264,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 60%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	-	-	-
2	2017	-	-	-
3	2018	12.476.812.686,00	2.298.558.026,00	18%
4	2019	10.413.803.418,00	10.300.903.926,00	99%
5	2020	3.122.468.060,00	3.100.098.312,00	99%
Jumlah		26.013.084.164,00	15.699.560.264,00	60%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 10.313.523.900,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang

berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.9

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.	1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Bathin Solapan.	2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat
3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan	3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam	4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	mengeluh terhadap pelayanan publik
--	------------------------------------

Tabel 2.10

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

<i>Kekuatan (Strengths)</i>	<i>Kelemahan (weakness)</i>
1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	1. Kualitas SDM masih belum memadai. Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;	2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
	4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas 2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik 3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM masih belum memadaiMeskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional 2. Kurang optimalnya penerapan SOP 3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. 4. Jumlah aparatur yang Belum memadai. 	<p>Alternatif Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidakdiatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah "**Pelayanan Publik yang belum Prima**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan publikbelum

optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- e. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
- f. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan
- g. Masih adanya konflik masyarakat
- h. Masih adanya konflik batas administrasi
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- j. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Bathin Solapan lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Bermarwah merupakan suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa. Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan yaitu pada Misi II, yaitu:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utamasetiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 3.1

Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bathin Solapan

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan 2. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal 5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa. 6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan 7. Masih adanya konflik masyarakat 8. Masih adanya konflik batas administrasi 9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 	Pelayanan Publik yang belum Prima

		10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan	
--	--	--	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal point dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Hal ini mengingat bila misi dan visi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Bathin Solapan yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi II RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Renstra Kecamatan Bathin Solapan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Target Enam Tahun mendatang					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 %	89 %	90 %	91 %	94 %	95 %
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS	85 %	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %
		Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	D	C	C	B	B	A

Sumber:RPJMDKabupatenBengkalisTahun2021-2026

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2021-2026

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera		
Misi ke-II	Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Peningkatankualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum
			Menyelenggarakan standard pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Penguatan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum
			Mengkoordinasikan penenggakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Penguatan kebijakan pembinaan masyarakat dan desa serta kelurahan	Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan pemerintahan desa serta kelurahan

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bathin Solapan.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Selengkapnya target-target capaian kinerja Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk periode 2019-2023 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		88 %	89 %	90 %	91 %	94 %	95 %	95 %
2.	Persentase penurunan gangguan KANTIBMAS		85 %	87 %	88 %	90 %	92 %	94 %	94 %
3.	Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik		D	C	C	B	B	A	A

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat tiga indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII**PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Bathin Solapan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Kecamatan Bathin Solapan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Sebangar, Maret 2021

CAMAT BATHIN SOLAPAN

WAHYUDDIN, S.Sos, MM

NIP. 19710303 199201 1 001

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
									2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Knerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			5.941.790.136		8.668.100.736		8.939.102.728		9.189.868.927		9.488.745.516		9.833.621.779		51.514.724.823			
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			170.480.000		154.810.000		157.230.000		161.780.000		161.780.000		161.780.000		161.780.000		967.860.000	
	2. Meningkatkan kualitas sosial masyarakat	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan yang disiapkan	2 Dokumen	114.420.000	2 Dokumen	98.750.000	2 Dokumen	98.750.000	2 Dokumen	98.750.000	2 Dokumen	98.750.000	2 Dokumen	98.750.000	12 Dokumen	608.170.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disiapkan	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	6 Dokumen	93.840.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disiapkan	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	15.640.000	6 Dokumen	93.840.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yang Disiapkan	3 Dokumen	15.640.000	3 Dokumen	15.640.000	3 Dokumen	17.200.000	3 Dokumen	20.250.000	3 Dokumen	20.250.000	3 Dokumen	20.250.000	18 Dokumen	109.230.000		
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disiapkan	2 Dokumen	9.140.000	2 Dokumen	9.140.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	11.500.000	2 Dokumen	11.500.000	2 Dokumen	11.500.000	12 Dokumen	62.780.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.681.180.040		2.681.962.040		2.811.122.642		2.946.741.274		3.089.140.838		3.238.660.380		17.448.807.214		
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.566.790.040	12 Bulan	2.566.790.040	12 Bulan	2.695.129.542	12 Bulan	2.829.886.019	12 Bulan	2.971.380.320	12 Bulan	3.119.949.336	72 Bulan	16.749.925.297	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disiapkan	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	16.422.000	1 Dokumen	17.243.100	1 Dokumen	18.105.255	1 Dokumen	19.010.518	1 Dokumen	19.961.044	6 Dokumen	106.381.916	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disiapkan	12 Dokumen	98.750.000	12 Dokumen	98.750.000	12 Dokumen	98.750.000	12 Dokumen	98.750.000	12 Dokumen	98.750.000	12 Dokumen	98.750.000	72 Dokumen	592.500.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			207.640.000		285.222.000		401.243.100		402.105.255		403.010.518		403.961.044		2.103.181.916		
		7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disiapkan	1 Dokumen	15.640.000	1 Dokumen	16.422.000	1 Dokumen	17.243.100	1 Dokumen	18.105.255	1 Dokumen	19.010.518	1 Dokumen	19.961.044	6 Dokumen	106.381.916	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
		7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor Camat yang dibutuhkan	10 Orang	192.000.000	14 Orang	268.800.000	20 Orang	384.000.000	20 Orang	384.000.000	20 Orang	384.000.000	20 Orang	384.000.000	104 Orang	1.996.800.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			101.784.000		123.500.000		133.670.000		143.843.400		164.020.268		154.200.673		821.018.341				

7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Instruktur Senam yang dibutuhkan	2 Orang	8.500.000	2 Orang	8.500.000	2 Orang	8.670.000	2 Orang	8.843.400	2 Orang	9.020.268	2 Orang	9.200.673	12 Orang	52.734.341	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang disiapkan Pakaian Dinas dan Atributnya	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	15.000.000	180 Orang	90.000.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Pemenuhan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	12 Bulan	78.284.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	130.000.000	72 Bulan	678.284.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			818.644.700		951.050.000		996.407.500		1.044.032.875		1.094.039.519		1.146.546.495		6.050.721.088		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang dibutuhkan	10 Item	35.308.000	15 Item	47.500.000	18 Item	49.875.000	20 Item	52.368.750	22 Item	54.987.188	22 Item	57.736.547	107 Item	297.775.484	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Alat Pembersih dan Alat Tulis Kantor Yang dibutuhkan	48 Item	112.740.900	49 Item	118.500.000	50 Item	124.425.000	50 Item	130.646.250	50 Item	137.178.563	50 Item	144.037.491	297 Item	767.528.203	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat dan Kegiatan Lapangan yang dibutuhkan	3560 Kotak	86.980.000	4200 Kotak	95.000.000	4250 Kotak	99.750.000	4300 Kotak	104.737.500	4350 Kotak	109.974.375	4400 Kotak	115.473.094	25060 Kotak	611.914.969	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Bulan Pemenuhan Barang dan Cetak Pengandaan Yang dilakukan	12 Bulan	83.537.800	12 Bulan	87.650.000	12 Bulan	92.032.500	12 Bulan	96.634.125	12 Bulan	101.465.831	12 Bulan	106.539.123	72 Bulan	567.859.379		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Pemenuhan Berlangganan Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	27.500.000	12 Bulan	28.500.000	12 Bulan	29.925.000	12 Bulan	31.421.250	12 Bulan	32.992.313	12 Bulan	34.641.928	72 Bulan	184.980.491	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pemenuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	12 Bulan	428.678.000	12 Bulan	530.000.000	12 Bulan	556.500.000	12 Bulan	584.325.000	12 Bulan	613.541.250	12 Bulan	644.218.313	72 Bulan	3.357.262.563	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Operator Website yang dibutuhkan	1 Orang	43.900.000	1 Orang	43.900.000	1 Orang	43.900.000	1 Orang	43.900.000	1 Orang	43.900.000	1 Orang	43.900.000	6 Orang	263.400.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.199.815.000		3.479.420.300		3.060.004.000		3.070.004.080		3.080.204.162		3.090.608.245		16.980.055.786		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebeleur Yang dibutuhkan	36 Item	152.898.000	15 Item	235.100.000	10 Item	239.802.000	12 Item	244.598.040	13 Item	249.490.001	15 Item	254.479.801	101 Item	1.376.367.842	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Item Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dibutuhkan	34 Item	246.917.000	25 Item	255.100.000	20 Item	260.202.000	22 Item	265.406.040	24 Item	270.714.161	25 Item	276.128.444	150 Item	1.574.467.645	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dilakukan	3 Kegiatan	800.000.000	5 Kegiatan	2.989.220.300	7 Kegiatan	2.560.000.000	10 Kegiatan	2.560.000.000	15 Kegiatan	2.560.000.000	15 Kegiatan	2.560.000.000	55 Kegiatan	14.029.220.300	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.404.896		597.404.896		863.625.141		869.736.398		876.153.218		882.890.879		4.540.215.427		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Kantor Camat yang dibutuhkan	14 Orang	289.800.000	22 Orang	436.800.000	34 Orang	667.200.000	34 Orang	667.200.000	34 Orang	667.200.000	34 Orang	667.200.000	172 Orang	3.395.400.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi Kantor Camat	12 Bulan	116.404.896	12 Bulan	116.404.896	12 Bulan	122.225.141	12 Bulan	128.336.398	12 Bulan	134.753.218	12 Bulan	141.490.879	72 Bulan	759.615.427	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Rumah Dinas Camat dan Sekretaris Camat Yang dibutuhkan	1 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	55.000.000	11 Unit	270.000.000		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Supir Kantor Camat yang dibutuhkan	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	1 Orang	19.200.000	6 Orang	115.200.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			311.841.500		394.731.500		515.800.345		551.625.645		620.396.995		754.974.065		2.602.865.050		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan dan diuruskan Izin/Kelayakannya	2 Unit	96.061.500	2 Unit	96.061.500	2 Unit	98.943.345	2 Unit	101.911.645	2 Unit	104.968.995	2 Unit	108.118.065	12 Unit	606.065.050	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Camat yang dibutuhkan	10 Orang	192.000.000	14 Orang	268.800.000	20 Orang	384.000.000	20 Orang	384.000.000	20 Orang	384.000.000	20 Orang	384.000.000	104 Orang	1.996.800.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tahun Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan	1 Tahun	23.780.000	1 Tahun	29.870.000	1 Tahun	32.857.000	1 Tahun	65.714.000	1 Tahun	131.428.000	1 Tahun	262.856.000	6 Tahun	546.505.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			167.112.800		230.500.000		230.500.000		230.500.000		230.500.000		230.500.000		1.319.612.800		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.112.800		38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		227.612.800		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perwakilan Kelompok Masyarakat Yang Menghadiri Musrenbang	200 Orang	35.112.800	200 Orang	38.500.000	200 Orang	38.500.000	200 Orang	38.500.000	200 Orang	38.500.000	200 Orang	38.500.000	1200 Orang	227.612.800	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	02	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan			132.000.000		192.000.000		192.000.000		192.000.000		192.000.000		192.000.000		1.092.000.000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dibutuhkan	7 Orang	132.000.000	10 Orang	192.000.000	10 Orang	192.000.000	10 Orang	192.000.000	10 Orang	192.000.000	10 Orang	192.000.000	57 Orang	1.092.000.000	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			486.582.000		521.524.880		542.385.875		564.081.310		586.644.563		610.110.345		3.311.328.973		
7	01	03	2.01		Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			384.322.000		399.694.880		415.682.675		432.309.982		449.602.381		467.586.477		2.549.198.396		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan	9 Kegiatan	1.092.975.000	9 Kegiatan	1.095.639.800	9 Kegiatan	1.139.465.392	9 Kegiatan	1.185.044.008	9 Kegiatan	1.232.445.768	9 Kegiatan	1.281.743.599	54 Kegiatan	7.027.313.566	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			102.260.000		121.830.000		126.703.200		131.771.328		137.042.181		142.523.868		762.130.577		
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Posko PPKM yang didirikan di Kecamatan	1 Posko	384.322.000	1 Posko	399.694.880	1 Posko	415.682.675	1 Posko	432.309.982	1 Posko	449.602.381	1 Posko	467.586.477	6 Posko	2.549.198.396	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			102.260.000		121.830.000		126.703.200		131.771.328		137.042.181		142.523.868		762.130.577		

7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				102.260.000		121.830.000		126.703.200		131.771.328		137.042.181		142.523.868		762.130.577		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Yang dilakukan	12 Kali	102.260.000	12 Kali	121.830.000	12 Kali	126.703.200	12 Kali	131.771.328	12 Kali	137.042.181	12 Kali	142.523.868	72 Kali	762.130.577	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	05		PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				322.280.000		347.430.000		364.801.500		383.041.575		402.193.654		422.303.336		2.242.050.065		
7	01	04	2.04	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				322.280.000		347.430.000		364.801.500		383.041.575		402.193.654		422.303.336		2.242.050.065		
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional yang dilakukan	1 Kegiatan	200.450.000	1 Kegiatan	225.600.000	1 Kegiatan	236.880.000	1 Kegiatan	248.724.000	1 Kegiatan	261.160.200	1 Kegiatan	274.218.210	6 Kegiatan	1.447.032.410	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Desa dalam Pembinaan bersama Forum Koordinasi Kecamatan	13 Desa	121.830.000	13 Desa	121.830.000	13 Desa	127.921.500	13 Desa	134.317.575	13 Desa	141.033.454	13 Desa	148.085.126	78 Desa	795.017.655	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.040.000		20.040.000		20.440.800		20.849.616		21.266.608		21.691.940		124.328.965		
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.040.000		20.040.000		20.440.800		20.849.616		21.266.608		21.691.940		124.328.965		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang dievaluasi	13 Desa	9.130.000	13 Desa	9.130.000	13 Desa	9.312.600	13 Desa	9.498.852	13 Desa	9.688.829	13 Desa	9.882.606	78 Desa	56.642.887	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Yang dibina	13 Desa	10.910.000	13 Desa	10.910.000	13 Desa	11.128.200	13 Desa	11.350.764	13 Desa	11.577.779	13 Desa	11.809.335	78 Desa	67.686.078	Kantor Camat Bathin Solapan	Kecamatan Bathin Solapan
JUMLAH ANGGARAN PERTAHUN								Rp 7.040.064.936		Rp 9.909.425.616		Rp 10.223.934.103		Rp 10.520.112.756		Rp 10.866.392.522		Rp 11.260.751.270		Rp 59.274.176.203		